PENGANTAR

TATA HUKUM PEMERINTAHAN

& DASAR-DASAR TATA NEGARA DI INDONESIA

A. Junaedi Karso

Biografi

A. Junaedi Karso

Lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202220730

ISBN 978-623-5251-80-6
9 786235 251806

PENGANTAR TATA HUKUM PEMERINTAHAN & DASAR-DASAR TATA NEGARA DI INDONESIA

A. Junaedi Karso

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR TATA HUKUM PEMERINTAHAN
& DASAR-DASAR TATA NEGARA DI INDONESIA

Penulis : **A. Junaedi Karso**

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-5251-80-6

No. HKI : EC00202220730

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Alhamdulillahirabbil'alamin, **Pengantar Hukum Tata Pemerintahan** ini akhirnya dapat selesai, meskipun telah melewati proses yang cukup lama. Membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan sekitar Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan. Buku ini membagi pembahasannya dalam lima bab. Bab pertama membahas tentang pemerintahan sebagai pengantar untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Kemudian bab kedua membahas tentang hukum tata negara. Pada bab ketiga, buku ini membahas mengenai sistem negara dan pemerintahan. Kemudian dilanjut bab keempat yang mengkaji tentang lembaga-lembaga negara. Terakhir, bab kelima, membahas tentang praktik hukum tata negara di Indonesia. Dalam masing-masing bab juga diuraikan lebih jauh dalam beberapa subbab.

Tujuan buku ajar ini adalah sebagai buku pegangan mahasiswa program studi ilmu hukum tata negara, khususnya mata kuliah Ilmu Hukum Tata Pemerintahan/Negara. Meskipun demikian, buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan atau acuan bagi siapa saja yang memiliki minat pada Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan. Hal ini karena pembahasan dalam setiap bab buku ini cukup mendalam, sehingga sangat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji tentang Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku **Pengantar Hukum Tata Pemerintahan**, Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Dengan selesainya penyusunan buku ajar ini, banyak pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penulisan buku ajar ini. Kepada mereka, penulis sampaikan ucapan terima

kasih yang sedalam-dalamnya. Selain itu, penulis sangat berharap masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan buku ini. Harapannya buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan pembaca, khususnya tentang Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan di Indonesia.

Billahit taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Maret 2022

Penulis,

A. Junaedi Karso

DAFTAR ISI

PRAKATA iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 PEMERINTAHAN 1
A. Pengertian Pemerintahan 1
B. Fungsi Pemerintahan 9
C. Asas Pemerintahan 18
1. Asas Pemerintahan Umum 18
2. Asas Pemerintah Daerah 22
3. Asas Pemerintahan Negara Indonesia 24
4. Asas Pemerintahan yang Baik dan Benar 25
D. Pemerintah Pusat dan Daerah 28
E. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 37
1. Hubungan Kewenangan 39
2. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah 42
3. Hubungan Pengawasan 48
4. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah 51
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 53
A. Peristilahan dan Sejarah Perkembangan Hukum Tata Pemerintahan 53
B. Pengertian-Pengertian Hukum Tata Pemerintahan 55
1. Institusional/Struktural Bestuur 57
2. Fungsional Bestuur 57
3. Proses Bestuur 57
C. Studi Hukum Tata Pemerintahan 61
D. Ciri Dan Sifat Hukum Tata Pemerintahan Dalam Negara Modern 65
E. Ruang Lingkup Hukum Tata Pemerintahan 66
F. Kedudukan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Lapangan Hukum 69
G. Objek dan Subjek Hukum Tata Pemerintahan 73
1. Objek Hukum Tata Pemerintahan 73
2. Subjek Hukum Tata Pemerintahan 75
3. Sumber-Sumber Hukum Tata Pemerintahan 79

H. Peraturan Perundang-undangan 81
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 81
2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 82
3. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan ...82
4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 83
I. Konsep Negara Hukum Indonesia 86
J. Kerangka Teori 87
1. Ilmu Pemerintahan 87
2. Kewenangan Pemerintah 93
3. Hukum Tata Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia 95
BAB 3 HUKUM TATA NEGARA 99
A. Pengertian Hukum Tata Negara 99
B. Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara 104
C. Metode dan Penafsiran dalam Hukum Tata Negara 114
1. Metode dalam Hukum Tata Negara 114
2. Penafsiran dalam Hukum Tata Negara 118
BAB 4 DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA 126
A. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara 126
1. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara 126
2. Sumber Hukum Tata Negara 128
3. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia 129
B. Asas-Asas Hukum Tata Negara 147
1. Asas Kekeluargaan 147
2. Asas Kedaulatan Rakyat 150
3. Asas Pembagian Kekuasaan 152
4. Asas Negara Hukum 155
C. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 156
1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1945-1949 156
2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1949-1950 164
3. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1950 - 1959 166

4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1959 - sekarang 167
BAB 5 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 182
A. Pengertian Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara 182
B. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..... 191
1. Teori Pemisahan dan Teori Pembagian Kekuasaan 191
2. Penamaan dan Dasar Hukum Atribusi Wewenang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945..... 192
C. Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 195
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 195
2. Dewan Perwakilan Rakyat 208
3. Dewan Perwakilan Daerah..... 222
4. Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden..... 234
5. Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) 236
6. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)..... 240
D. Hubungan Antarlembaga Negara..... 241
1. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah..... 241
2. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden 242
3. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden..... 243
4. Hubungan antara Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung..... 245
5. Hubungan Presiden dan Kementerian Negara 246
6. Hubungan Presiden/Pemerintah dengan Mahkamah Agung 246
7. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan..... 246

BAB 6 PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA 248
A. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis 248
B. Lahan Praktik Hukum Tata Negara 255
C. Praktik Peradilan Tata Negara 262
1. Peradilan Tata Negara 262
2. Pengujian Konstitutionalitas Undang-Undang 265
3. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara 266
4. Pembubaran Partai Politik 267
5. Perselisihan Hasil Pemilu 268
6. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden 270
7. Kebutuhan akan Sarjana Hukum Tata Negara 271
DAFTAR PUSTAKA 275
TENTANG PENULIS 287

BAB 1 PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Peristilahan dan Sejarah Perkembangan Hukum Tata Pemerintahan

Studi kajian HTP ini telah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah *Staats-en Administratiefrecht*. Sebagaimana pada *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta, sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah Staats-en Administratiefrecht ini dipergunakan dengan Prof. Dr. J.H.A. Logemann sebagai dosen pengampunya. Sebenarnya peristilahan ini di negeri asalnya (Belanda) terdiri atas 2 macam mata kuliah, yaitu *Staatsrecht* (Hukum Tata Negara) dan *Administratiefrecht* (Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pemerintahan). Artinya, penyampaian mata kuliah Administratiefrecht di Indonesia pada periode tersebut digabungkan dengan mata kuliah Staatsrecht. Baru pada tahun 1946, gabungan mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah dan yang kemudian keduanya secara resmi dipakai oleh Universitas Indonesia dengan mempergunakan peristilahan Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk mata kuliah *Administratiefrecht*.

Sejarah perkembangan HTP selanjutnya, diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah *Administratiefrecht* ini. Seperti misalnya istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang dimunculkan oleh E. Utrecht dan Prof. Djoko Sutono, SH dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960 menggantikan istilah HAN. Namun setelah tahun 1960,

BAB 3

HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara merupakan padanan dari istilah dalam Bahasa Belanda *Staatsrecht*, dalam Bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam Bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam Bahasa Perancis *Droit Constitutionel*. Mengenai pengertian Hukum Tata Negara, E.C.S Wade dan G. Godfrey Phillips mengatakan bahwa *there is no hard and fast definition of constitutional law. According to one very wide definition, constitutional law is that part of the law which relates to the system of government of the country.* Oleh karena itu, menurut mereka, *it is more convenient to define constitutional law as meaning those laws which regulate the structure of the principle organs of govern-ment and their relationship to each other and to the citizen, and determine their main functions.*

Sementara itu, M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengutip, beberapa definisi sampai pada simpulan bahwa Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Hampir sama dengan definisi ini, R.G. Kartasapoetra mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah sebagai sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya. Definisi-

BAB 4

DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA

A. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

1. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

Menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian tanpa kehati-hatian dan kecermatan, maka apa yang dimaksud sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan. Dalam hubungan ini, Paton menyatakan bahwa sumber hukum menurut tinjauan sejarah, berbeda dengan pengertian sumber hukum menurut tinjauan filsafat, sumber hukum menurut tinjauan agama berbeda dengan pengertian menurut tinjauan ilmu hukum.

1. Sumber hukum menurut tinjauan sejarah: *Pertama*, stelsel hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang. *Kedua*, kitab-kitab hukum manakah yang telah diperhatikan pembuat undang-undang pada waktu menetapkan hukum yang berlaku sekarang.
2. Sumber hukum menurut tinjauan filsafat: Pertama, sumber untuk atau menentukan isi hukum. Kedua, sumber untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum.
3. Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasulnya.

BAB 5 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

Sebagaimana dalam kajian Ilmu Negara terkait bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan di dunia, dan berdasarkan penelusuran bahan hukum di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan lembaga negara, maka dapat ditemukan konsep dan pengertian mendasar dari sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Pertama, dalam bahan hukum primer, yakni pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, ditegaskan berkaitan dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara atau yang dalam nomenklaturnya disebut sebagai "*Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar...*" sebagai rujukan mendasar membahas dimensi sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang, meliputi hal-hal berikut ini:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2) Sistem Konstitusional, artinya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis*), sebagaimana dirumuskan pada Penjelasan Undang-undang Dasar, disebutkan maknanya ialah

BAB 6

PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA

A. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis

Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka, atau tepatnya dari tahun 1945 sampai tahun 1998 ketika terjadinya reformasi nasional (53 tahun sejak kemerdekaan), bidang ilmu hukum tata negara atau *constitutional law* agak kurang memperoleh pasaran di kalangan mahasiswa di Indonesia. Penyebabnya ialah bahwa selama kurun waktu tersebut, orientasi bidang studi hukum tata negara ini sangat dekat dengan politik, sehingga siapa saja yang berminat menggelutinya sebagai bidang kajian yang rasional, kritis, dan objektif, dihadapkan pada risiko politik dari pihak penguasa yang cenderung sangat otoritarian. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, siklus kekuasaan mengalami stagnasi, sehingga dinamika demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sewajarnya yang memungkinkan berkembangnya pandangan-pandangan kritis mengenai persoalan-persoalan politik ketatanegaraan. Akibatnya, menjadi sarjana hukum tata negara bukanlah cita-cita yang tepat bagi kebanyakan generasi muda.

Risiko kedua adalah bahwa bidang kajian hukum tata negara ini dianggap sebagai lahan yang kering, tidak begitu jelas lapangan kerja yang dapat dimasuki. Itulah sebabnya setelah kurikulum fakultas hukum menyediakan program studi hukum ekonomi, rata-rata mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia cenderung memilih program studi hukum ekonomi atau hukum perdata umum daripada program studi hukum tata

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Rasyid, Harun. 1998. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Anonymous, 2002, *Undang-undang Dasar '45 Amandemen ke-4 Tahun 2002*; Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.

----------, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susduk*, Bandung: Penerbit "Citra Umbara".

Anwar, Chairul, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta : Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Asshiddiqie, Jimly, "Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Material terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK", dalam *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1, 2002, Jakarta Le IP.

----------, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co.

----------, 2002, *Konsolidasi Naskah Undang-undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas lndonesia.

----------, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

----------, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.

----------, 2010, *Komentar atas Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diundangkan pada 15 Januari 2014, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diundangkan pada 24 November 2008, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diundangkan pada tanggal 15 Desember 2014, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diundangkan pada 20 Juli 2011, diumumkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

TENTANG PENULIS

A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade* Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (*Gorontalo Journal of Government and Political Study*, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (*Journal of Government and Civil Society*, 2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land

Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanitities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia,* (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand,* (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia,* (Journal L Sociale, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency,* (Journal La Bisecoman, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports,* (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia,* (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets,* (Journal La Sociale, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare,* (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha

milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021)

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika *Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di

BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun

2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202220730, 28 Maret 2022
Pencipta		
Nama	:	**Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**
Alamat	:	Dusun Kebon Randu RT 005 RW 001 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**
Alamat	:	Dusun Kebon Randu RT 005 RW 001 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Pengantar Tata Hukum Pemerintahan & Dasar-Dasar Tata Negara Di Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	28 Maret 2022, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000336182

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.